



UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS EKONOMI

SKRIPSI

**Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap
Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kabupaten Pasaman**

OLEH:

AN'GILINA MARTA

06 153 086

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat S1

di Jurusan Akuntansi

PADANG

2010

ABSTRAK

Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam APBN negara Republik Indonesia, yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan. Agar penerimaan dari sektor pajak dapat maksimal, diperlukan kesadaran dan pemahaman yang memadai dari wajib pajak tentang perpajakan. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan menguji pemahaman masyarakat Kabupaten Pasaman terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman diukur dengan menggunakan media kuesioner yang terdiri dari 31 pertanyaan dan dilakukan kepada 64 orang wajib pajak PPh orang pribadi di Kabupaten Pasaman dengan kriteria wajib pajak yang mempunyai NPWP dan berpenghasilan di atas PTKP per tahunnya. Variabel yang diukur adalah pemahaman terhadap pengetahuan umum PPh, prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pelaksanaan pembayaran PPh. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh hasil bahwa wajib pajak PPh orang pribadi di Kabupaten Pasaman tergolong paham dengan skor tingkat pemahaman 68,22%. Sementara 31,78% lainnya dikategorikan kurang paham karena hanya mampu menjawab benar kurang dari 50% pertanyaan.

Keyword: Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam APBN negara Republik Indonesia, yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini (Tjahjono dan Husein, 2005). Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai sarana dan prasarana publik di seluruh sektor kehidupan, seperti sarana transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial, pertahanan dan berbagai fasilitas lainnya yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan yang harus terus meningkat dalam rangka pembangunan masyarakat adil, makmur dan sejahtera, maka itu penerimaan pajak pun dituntut untuk terus meningkat. Namun, dari tahun ke tahun penerimaan pajak tidak pernah maksimal. Hal itu disebabkan adanya upaya dari wajib pajak untuk melakukan usaha menghindarkan diri dari pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan perangkat hukum yang mengatur pemajakan terhadap rakyat. Prinsip yang utama adalah adanya keadilan pengenaan pajak (Tjahjono dan Husein, 2005). Keadilan akan tercapai jika adanya kepastian Undang-Undang Pajak, yang merupakan bagian

dari hukum yang mengikat warga negara. Perekonomian sebuah negara sedikit banyak dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintahnya. Jika para pembuat kebijakan di bidang perpajakan membuat kebijakan yang terlalu kompleks atau sering berubah-ubah, Wajib Pajak tidak mungkin memiliki gambaran yang pasti atas pengaruh peraturan pajak tersebut terhadap investasi dan usaha yang mereka jalankan.

Bagi Indonesia, fungsi dari peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang utama untuk beberapa tahun ke depan, akan semakin berat. Hal ini disebabkan karena proses pemulihan ekonomi dan stabilitas sosial politik yang sedang dilakukan di Indonesia pada saat ini akan mempengaruhi perkembangan usaha dan investasi, kesempatan kerja, produksi serta distribusi barang dan jasa yang selanjutnya akan berpengaruh pada penghasilan dan daya beli masyarakat secara keseluruhan serta pada akhirnya akan berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, maka pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa undang-undang di bidang perpajakan.

Undang-undang yang diubah tersebut antara lain UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasaman, dengan mengambil sampel sebanyak 64 wajib pajak PPh orang pribadi yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan penghasilannya per tahun di atas PTKP. Data ini diperoleh dari wajib pajak yang telah mengisi kuesioner. Sampel diperoleh dengan mencari informasi kepada masyarakat yang mempunyai NPWP dengan mendatangi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Lubuk Sikaping, mendatangi rumah atau tempat bekerja wajib pajak, dan melalui bantuan pihak ketiga. Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman tentang pengetahuan umum wajib pajak terhadap pajak penghasilan, pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak dan pemahaman terhadap prosedur pembayaran pajak penghasilan.

Setelah data diolah, diperoleh hasil wajib pajak PPh orang pribadi di wilayah Kabupaten Pasaman tergolong paham terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan tingkat pemahaman sebesar 68,22%. Jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka diperoleh tingkat pemahaman wajib pajak PPh orang pribadi jenis kelamin laki-laki sebesar 69,29% dan

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Regina Dwi. 2007. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Padang*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Boediono, B. 1996. *Perpajakan Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Kawula Indonesia.
- Brotodiharjo, R, Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Gramedia
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta : Yayasan Andi.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurgiyantoro, Burhan, Gunawan, Marzuki. 2000. *Statistik Terapan untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ortax. 2009. *Susunan dalam Satu Naskah dan Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Integral Prima Data.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rezeki, Tri. 2009. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Solok*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan. 2005. *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Singgih. 2001. *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi Offset.